

**TANTANGAN PENINGKATAN PENERAPAN SAK EMKM PADA  
UMKM DI BANYUWANGI****Novilia Kareja<sup>1)\*</sup>, Nurul Alfiah<sup>2)</sup>, Shinta Setiadevi<sup>3)</sup>**<sup>1,2,3</sup>Politeknik Negeri Banyuwangi<sup>1</sup>[novilia@poliwangi.ac.id](mailto:novilia@poliwangi.ac.id), <sup>2</sup>[nurul.alfiyah@poliwangi.ac.id](mailto:nurul.alfiyah@poliwangi.ac.id), <sup>3</sup>[shinta.setiadevi@poliwangi.ac.id](mailto:shinta.setiadevi@poliwangi.ac.id)**Info Artikel :**

Diterima : 13 Januari 2022

Disetujui : 20 Januari 2022

Dipublikasikan : 28 Januari 2022

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan SAK EMKM pada UMKM di Banyuwangi. Kondisi yang berlangsung saat ini ialah belum adanya pencatatan keuangan dan pemisahan pengelolaan keuangan pada UMKM tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Identifikasi mengenai keterbatasan dalam penerapan SAK EMKM ditelusuri dan dikemukakan untuk dapat menentukan serangkaian upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerapan SAK EMKM. Sejumlah gagasan dipaparkan sebagai gambaran bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk membuat penerapan SAK EMKM semakin meningkat dan membangun budaya pelaporan keuangan pada UMKM dengan berlandaskan pada teori agensi dan teori sinyal. Budaya penyajian laporan keuangan dan penerapan SAK EMKM tidak dapat ditumbuhkan dan dikembangkan tanpa peran serta maupun dukungan dari sejumlah lembaga terkait dan dorongan dari UMKM sendiri. Kolaborasi dari setiap unsur ini yang mampu mendorong untuk timbulnya kemauan menyajikan laporan keuangan pada UMKM berdasarkan SAK EMKM.

**Kata Kunci:**  
Pencatatan  
Keuangan,  
UMKM,  
SAKM  
EMKM**ABSTRACT**

*This study was conducted to describe the efforts that can be made to improve the application of SAK EMKM to SMEs in Banyuwangi. The current condition is that there is no financial recording and separation of financial management in the MSMEs. This research is qualitative research conducted with a descriptive approach. Identification of limitations in the application of SAK EMKM is explored and put forward to be able to determine a series of efforts that can be used to improve the application of SAK EMKM. Some ideas are presented as an illustration of the forms of efforts that can be made to increase the application of SAK EMKM and build a culture of financial reporting in MSMEs based on agency theory and signal theory. The culture of presenting financial reports and the application of SAK EMKM cannot be grown and developed without the participation and support of several related institutions and encouragement from SMEs themselves. The collaboration of each of these elements can encourage the emergence of a willingness to present financial reports to MSMEs based on SAK EMKM.*

**Keywords:**  
Financial  
Recording,  
SMEs, SAK  
EMKM

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM) merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki peranan besar dalam perekonomian Indonesia. Meskipun kondisi perekonomian Indonesia yang sempat mengalami fase krisis, akan tetapi nyatanya tidak membuat UMKM menjadi runtuh sekalipun turut mengalami guncangan. Pada kondisi krisis tersebut UMKM mampu bertahan dan semakin banyak UMKM yang tumbuh dan berkembang beberapa waktu ke belakang. Informasi yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha menyatakan bahwa bentuk usaha di Indonesia hampir 99% berada pada skala UMKM (OJK, 2020)

Peran UMKM yang cukup besar mendorong banyak pihak untuk dapat terus mendukung perkembangan UMKM. Kemampuan UMKM untuk bertahan dalam masa perekonomian yang berat tidak berarti bahwa UMKM tumbuh tanpa halangan atau hambatan. Salah satu permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh UMKM ialah terkait pelaporan keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai salah satu lembaga profesi yang memiliki fokus dalam dunia akuntansi dan pelaporan keuangan turut ambil bagian untuk mendukung perkembangan UMKM. Keterbatasan UMKM dalam menyajikan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku umum mendorong IAI, khususnya Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), untuk merumuskan dan menyusun standar yang lebih ringkas. Standar yang dapat menjadi panduan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM dan disusun dengan mudah yaitu dengan menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat SAK EMKM). *Exposure draft* dari SAK EMKM disahkan pada tahun 2016 dan dinyatakan berlaku efektif sejak 01 Januari 2018.

Keberadaan SAK EMKM dan harapan yang ingin dicapai terhadap UMKM telah mendorong sejumlah pihak melakukan penelitian untuk melihat penerapan SAK EMKM. Handika & Baridwan (2018) melakukan penelitian untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi dalam penerapan SAK EMKM bagi UMKM. Handika & Baridwan (2018) menggunakan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* sebagai pendekatan yang dipilih untuk melakukan kajian atas faktor-faktor yang memengaruhi penerapan SAK EMKM. Hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa ekspektasi usaha, kinerja serta kondisi dan fasilitas yang ada memiliki pengaruh bagi UMKM dalam penerapan SAK EMKM.

Penelitian lain dilakukan oleh Hanifati & Leo (2019) dengan sudut pandang peran akuntan berpraktik untuk meningkatkan penerapan SAK EMKM. Pendekatan studi kasus dipilih untuk melakukan pemaparan lebih lanjut atas rumusan masalah yang disampaikan. Hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa implementasi SAK EMKM baru dapat dilakukan oleh usaha di skala menengah. Hasil ini kemudian memberikan suatu masukan bagi Kantor Jasa Akuntan untuk dapat memberikan layanan yang tidak hanya berhenti pada pemberian jasa untuk menyusun laporan keuangan namun meliputi pula serangkaian kegiatan lain termasuk konsultasi gratis untuk semakin mendorong penerapan SAK EMKM oleh UMKM.

Penelitian lain terkait UMKM dan SAK EMKM juga dikemukakan oleh beberapa peneliti baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif terkait UMKM dan Standar Keuangan diantaranya dilakukan oleh Narsa, Widodo, & Kurnianto (2012), Putra (2018), Tatik (2018), Purba (2019), dan Sundari &

Merry (2020). Penelitian dengan pendekatan kuantitatif diantaranya dilakukan oleh Trisomantagani, Yasa, & Yuniarta(2017), Adhikara (2018), , , Ardiana, Irianto, & Srijekji (2019), , serta Sutapa (2020), . Sementara Arieftiara, Putra, & Masripah (2019) melakukan bentuk pengabdian dalam mengenalkan SAK EMKM melalui pendampingan.. Kajian dari para peneliti baik secara kualitatif maupun kuantitatif dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi hingga implementasi SAK EMKM. Hasil penelitian yang ada memperlihatkan bahwa UMKM yang menjadi informan maupun sampel belum menyajikan laporan keuangan sesuai SAK EMKM.

Kondisi ini mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut pada UMKM di Banyuwangi terkait penyajian laporan keuangan dan SAK EMKM. Tinjauan akan dilakukan dengan melihat penerapan pencatatan keuangan serta penerapan SAK EMKM pada UMKM untuk kemudian disandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang selaras terkait SAK EMKM. Tinjauan ini diharapkan mampu memunculkan suatu gagasan yang dapat mendorong penerapan SAK EMKM pada UMKM di Banyuwangi.

## **KAJIAN TEORI**

### **Teori Agensi**

Teori Agensi diungkapkan oleh Jensen & Meckling (1976) yang memberikan suatu gambaran bahwa perusahaan diibaratkan sebagai suatu kumpulan kontrak yang menunjukkan hubungan keagenan antara *principal* (pemilik) kepada agen (manajer). Hubungan ini juga memberikan gambaran bahwa ketika setiap pihak memiliki keinginan untuk memaksimalkan keuntungan masing-masing akan terdapat peluang bahwa manajer melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya yang tidak sesuai dengan kepentingan dari pemilik (pemegang saham). Indikasi yang muncul ialah manajer tidak melaksanakan kewajibannya bagi kepentingan pemegang saham melainkan untuk kepentingannya sendiri. Hal ini kemudian yang dikenal sebagai permasalahan dalam keagenan (*agency problem*).

Teori agensi dapat menjadi landasan atau dorongan dari pelaku usaha sebagai penyedia laporan keuangan untuk secara mandatory menyajikan laporan keuangan dan menggunakan SAK EMKM. Dengan kondisi tertentu yang dibangun, penerapan SAK EMKM akan dapat semakin dipahami dan diterapkan oleh pelaku UMKM. Dasar dari teori ini dapat menjadi pondasi guna mendorong peningkatan penggunaan standar EMKM.

### **Teori Sinyal**

Teori sinyal mengungkapkan mengenai dorongan perusahaan untuk mengungkapkan informasi perusahaan terhadap pihak eksternal. Informasi yang disajikan oleh perusahaan baik keuangan maupun non keuangan merupakan suatu sinyal yang diberikan perusahaan terkait kinerjanya kepada pihak eksternal termasuk investor.

Teori sinyal memberikan pandangan bahwa manajer pada perusahaan dengan performa yang baik akan memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak. Harapannya ialah pengungkapan ini akan direspon positif dan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan dan juga bagi insentif yang akan mereka terima. Hubungan keagenan dapat menjadi dasar yang memengaruhi manajer dalam melakukan pengungkapan sukarela. Pengungkapan ini dilakukan untuk membuat pemegang saham yakin akan tindakan yang dilakukan oleh manajer ini telah sejalan dengan kepentingan

dari pemegang saham. Teori sinyal memberikan gambaran dorongan untuk kesediaan secara sukarela menyajikan informasi keuangan sebagai bentuk untuk mendapatkan respon positif dari pengguna informasi keuangan. Hal ini dapat berlangsung pada UMKM dengan terlebih dahulu memahami kebutuhan untuk bisa mendorong adanya pencatatan laporan keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memperoleh kajian lebih mendalam serta dapat memahami mengenai kondisi dan fenomena yang terjadi dan dihadapi subjek penelitian. Pendekatan ini dipandang lebih selaras dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Informan dalam penelitian ini ialah UMKM di kecamatan Banyuwangi yang terdaftar pada laman Website Dinas Koperasi serta bergerak pada sektor kuliner.

Sumber data untuk dalam penelitian ini ialah sumber data primer yakni langsung dari pelaku UMKM dan sumber data sekunder yang digali dari pandangan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang ada dilakukan melalui wawancara dan studi literatur.

## **PEMBAHASAN**

### **Evaluasi Penerapan SAK EMKM**

Penelitian ini dilakukan pada enam pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Banyuwangi. Pelaku UMKM ini bergerak pada sektor usaha makanan olahan dan oleh-oleh dan terdaftar pada laman website Dinas Koperasi dan UMKM Banyuwangi. Keenam pelaku UMKM ini telah menjalankan usahanya lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Proses wawancara yang dilakukan kepada pelaku UMKM memberikan gambaran bahwa keenam pelaku UMKM tidak melakukan pengelolaan keuangan termasuk pencatatan keuangan khusus untuk kegiatan usahanya. Sejumlah alasan dikemukakan oleh para pelaku UMKM yang dapat ditarik garis besarnya sebagai berikut (1) keterbatasan waktu; (2) keterbatasan sumber daya manusia; (3) keterbatasan informasi dan (4) pola pikir pelaku usaha.

Alasan yang dikemukakan oleh pelaku UMKM ini merupakan bentuk alasan yang saling terkait satu dengan lainnya yang kemudian membuat minimnya pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan keuangan dan pengelolaan keuangan secara khusus untuk kegiatan usaha. Paradigma pelaku UMKM menjadi bagian yang cukup berperan besar dalam melatabelakangi UMKM tidak menjalankan pencatatan keuangan. Pandangan bahwa pencatatan keuangan dan akuntansi merupakan hal yang sulit untuk dipenuhi dan dijalankan membuat pelaku UMKM enggan untuk melakukan pencatatan keuangan. Pola pikir tersebut dapat bersumber dari tiga alasan lain yakni karena waktu, sumber daya manusia dan informasi yang terbatas. Pelaku UMKM yang menjadi informan masih banyak melakukan proses mulai produksi hingga pemasaran sendiri atau belum banyak memiliki tenaga kerja. Hal ini yang kemudian membuat pelaku UMKM tidak memiliki banyak waktu untuk secara khusus mengenal, belajar dan melakukan pencatatan keuangan atau pembukuan keuangan usahanya.

Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki wawasan dasar terkait akuntansi dalam kegiatan usaha juga menjadi salah satu latar belakang tidak adanya penerapan SAK EMKM bahkan pencatatan keuangan. Selain kendala keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga kerja yang memahami mengenai pencatatan akuntansi juga menjadi faktor yang berpengaruh. Pelaku UMKM sebagian besar tidak memiliki latar belakang di bidang akuntansi sehingga hal ini dipandang menyulitkan bagi para pelaku UMKM. Hal ini ditunjang pula dengan keterbatasan informasi yang mereka miliki terkait SAK EMKM. Pelaku UMKM ini menyatakan bahwa secara umum mereka pernah tahu dan mendengar mengenai akuntansi dan pencatatan keuangan bahkan dinas pernah beberapa kali menyelenggarakan pelatihan dan diikuti oleh beberapa pelaku UMKM. Namun, seluruh pelaku UMKM yang ada menyatakan bahwa sejauh ini beliau belum pernah mengetahui atau mengenal mengenai SAK EMKM. Dari paparan ini dapat dilihat bahwa latar belakang tidak adanya penerapan SAK EMKM pada UMKM di Banyuwangi ini bagaikan suatu siklus atau satu kesatuan yang saling terkait satu dengan yang lain. Pola pikir bahwa SAK EMKM dan pencatatan keuangan merupakan sesuatu yang rumit dan sulit merupakan implikasi karena keterbatasan wawasan dan informasi mengenai SAK EMKM ditunjang dengan keterbatasan SDM yang memiliki dasar atau pengalaman dengan pencatatan keuangan. Jumlah sumber daya yang terbatas mempengaruhi waktu kerja yang dimiliki oleh pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan keuangan.

Kondisi serupa juga ditemukan oleh Narsa et al.,( 2012) yang melakukan kajian atas penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Persepsi yang menjadi salah satu kendala dalam proses implementasi SAK ETAP dan minimnya pencatatan keuangan. Pandangan bahwa usaha yang ada telah berjalan dan tumbuh meskipun tanpa pencatatan keuangan membuat keenganan dari pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan keuangan. Keterbatasan dari sudut pandang persepsi juga didapati oleh Sundari & Merry (2020). Hasil penelitian yang dilakukan Sundari & Merry (2020) memperlihatkan bahwa adanya ketidaksempurnaan pemahaman atas pentingnya pencatatan keuangan yang dimiliki pelaku UMKM yang kemudian membuat enggan untuk menyusun laporan keuangan atau melakukan pencatatan keuangan untuk usahanya.

### **Upaya Menumbuhkan Budaya Penerapan SAK EMKM**

Efektivitas penerapan dari SAK EMKM dapat dikaji dengan meminjam teori dari Lawrence M. Friedman sebagaimana yang tertuang dalam Sudjana (2019). Teori ini memberikan gambaran bahwa untuk mencapai keefektifan perlu adanya sinergi atas tiga unsur yang ada meliputi struktur, subansi dan budaya. Kaitannya dengan SAK EMKM, struktur yang dimaksud ialah IAI. Sementara untuk subansi ialah SAK EMKM, budaya ini dicerminkan oleh pola pikir atau paradigma pelaku UMKM terhadap SAK EMKM. Budaya pelaku UMKM dalam penerapan SAK EMKM menjadi salah satu faktor penting yang akan menentukan efektivitas penerapan SAK EMKM. Keberadaan SAK EMKM sebagai suatu subansi dalam sistem dan upaya yang dilakukan oleh IAI sebagai struktur dalam penerapan SAK EMKM tidak akan berdampak bila budaya pelaku UMKM dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan belum tumbuh atau berkembang.

Hal utama yang patut diperhatikan untuk dapat menumbuhkan dan mengembangkan budaya ini memahami latar belakang atau alasan yang mendasari penerapan SAK EMKM belum berlaku efektif dalam UMKM. Identifikasi terkait

hambatan tumbuhnya budaya pelaporan keuangan dalam konteks penelitian ini telah diungkapkan diantaranya ialah pola pikir terkait penyusunan laporan keuangan, keterbatasan kemampuan dari segi informasi yang kurang diketahui dan dipahami terkait SAK EMKM hingga keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mendukung hal tersebut dalam usaha yang dijalani UMKM. Hambatan ini yang dikemudian akan dikaji lebih dalam untuk dapat memberikan suatu konsep atau pemikiran untuk meningkatkan penerapan SAK EMKM dalam penelitian ini.

Poin utama yang diungkap oleh pelaku usaha dalam penelitian ini ialah terkait pola pikir atau *mindset* dari pelaku UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan terutama dalam koridor SAK EMKM. Dua hal utama yang diperoleh dari proses penelitian ini terkait pola pikir pelaku UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan ialah pelaku UMKM belum memiliki alasan atau motivasi besar terkait pentingnya menyusun laporan keuangan dan yang kedua bahwa menyusun laporan keuangan adalah hal sulit. Berkaca pada hal tersebut maka untuk meningkatkan penerapan SAK EMKM perlu upaya untuk bisa mengubah pola pikir dari pelaku UMKM.

Para pelaku UMKM ini tidak memiliki dorongan kuat untuk menyusun laporan keuangan. Pandangan yang berkembang dalam masyarakat bahwa penyusunan laporan keuangan ini disusun untuk memperoleh akses keuangan dari perbankan. Sementara itu, kondisi yang dialami dan yang berlangsung pada sebagian besar pelaku UMKM ini ialah belum memiliki keinginan untuk terikat dengan pendanaan dari perbankan dalam pengelolaan usahanya. Hal yang didapati dalam penelitian ini bahwa pelaku UMKM yang membutuhkan akses keuangan atau pendanaan dari perbankan rupanya tetap dapat memperoleh bantuan atau pendanaan sekali pun tidak menyusun atau menyajikan laporan keuangan. Kondisi seperti ini yang kemudian mengurangi dorongan untuk penerapan SAK EMKM. Dari gambaran kondisi ini, hal yang dapat dilakukan ialah menciptakan dorongan dan motivasi terlebih dahulu bagi pelaku UMKM untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Teori agensi dan teori sinyal dalam teori akuntansi dapat menjadi landasan teori untuk menampilkan dorongan atau alasan untuk menyajikan laporan keuangan. Teori agensi akan menghantarkan motivasi menyajikan laporan keuangan sebagai suatu kewajiban dan teori sinyal akan menghantarkan motivasi untuk secara sukarela menyajikan laporan keuangan. Teori agensi yang memberikan gambaran bahwa penyajian laporan keuangan ini menjadi media yang menjembatani kepentingan antara prinsipal dan agen. Laporan keuangan menjadi satu unsur wajib yang harus disajikan guna membantu para prinsipal mengawasi kinerja dari agen. Kondisi demikian membuat entitas skala besar yang melibatkan pendanaan dari pihak diluar manajemen akan menyajikan pelaporan keuangan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

UMKM selaku usaha yang dijalankan dan dikelola oleh para pelaku usaha sendiri bila dilihat memang tidak memiliki unsur untuk menjalankan kewajiban menyajikan laporan keuangan. Namun ada benang merah yang dapat ditarik dari keberadaan teori agensi ini bagi penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM oleh para pelaku UMKM yaitu keberadaan regulasi artinya ada unsur kewajiban yang perlu ditimbulkan dengan harapan bahwa ini bisa mengembangkan kegiatan usaha dari para pelaku UMKM. Hal ini bukan berarti diartikan secara tiba-tiba disusun suatu regulasi untuk memaksa UMKM menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM namun perlu dilakukan kajian mengenai unsur yang dapat mendorong terciptanya hal tersebut.

Pandangan ini serupa seperti yang disampaikan Hanifati & Leo (2019). Hanifati & Leo (2019) mengungkapkan bahwa keberadaan regulasi untuk menyajikan laporan

keuangan yang kredibel akan mendorong penerapan SAK EMKM. Selayaknya perusahaan atau entitas terbuka yang terdaftar pada Bursa dan memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. UMKM juga dapat diberikan dorongan dan motivasi dalam konteks yang serupa. Bila perusahaan terbuka terikat dengan Bursa untuk regulasi yang berada di dalamnya, UMKM dalam penerapan SAK EMKM dapat dikaitkan dengan dinas atau instansi terkait untuk bersama membangun regulasi guna menerapkan standar tersebut.

Berbeda dengan teori agensi yang menampilkan kewajiban penyajian laporan keuangan, teori sinyal memberikan gambaran mengenai motivasi secara sukarela untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Teori sinyal menekankan bahwa penyajian laporan keuangan merupakan cara atau sarana untuk menampilkan citra dari suatu entitas atau pelaku usaha kepada pihak yang akan memberikan peranan pada pengembangan usaha dari entitas dan berharap akan adanya respon positif. Kondisi ini dapat dibangun dan diciptakan bagi UMKM yang sekali lagi perlu adanya kolaborasi dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Kondisi ini dapat dibangun seperti yang disampaikan oleh Ir putri dari Ibu AN pelaku UMKM di bidang oleh-oleh. Ir yang juga merupakan pelaku usaha menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan ini akan berdampak besar bagi UMKM terutama ketika mengikuti kompetisi UMKM dan program pendanaan dari instansi tertentu. Salah satu indikator yang dilihat adalah terkait keberlangsungan usaha yang ditinjau dari laporan keuangan UMKM. UMKM yang mengikuti kegiatan tersebut secara tidak langsung akan berupaya menyajikan laporan keuangan yang baik guna mengharapkan respon positif dari instansi penyelenggara. Kolaborasi yang dijalin IAI dan instansi terkait akan mampu mendorong penerapan SAK EMKM tanpa membuat UMKM menjadi terpaksa karena dalam hal ini ada dampak yang dapat secara langsung dinikmati dan dirasakan oleh UMKM.

Kendala lain yang dihadapi oleh UMKM dalam upaya menyajikan laporan keuangan ialah keterbatasan pemahaman mengenai penyajian laporan keuangan dan keterbatasan sumber daya yang mampu menyusun dalam usahanya. Kedua hal ini sesungguhnya merupakan satu paduan. UMKM, khususnya skala mikro dan kecil, umumnya masih dikelola oleh pelaku UMKM sendiri dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas dengan fokus pada produksi. UMKM yang ditemui tidak memiliki tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan akuntansi maupun yang memahami mengenai penyusunan laporan keuangan. Demikian pula dengan pelaku UMKM. Para pelaku UMKM memiliki keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan selain karena kurang memahaminya juga karena keterbatasan waktu yang dimiliki. Fokus utama pada para pelaku ini ialah pada produksi dan pemasaran. Belum ada ikatan khusus yang membuat para pelaku usaha ini secara wajib harus menyajikan laporan keuangan. Berkaca pada hal ini maka peran serta dari segenap pihak dari bidang akuntansi khususnya bagian dari IAI akan menjadi penunjang untuk tumbuhnya budaya pelaporan keuangan terutama dengan SAK EMKM pada UMKM.

## **KESIMPULAN**

Upaya untuk menumbuhkan budaya pelaporan keuangan disertai dengan peningkatan penerapan SAK EMKM perlu ditumbuhkan dari pelaku UMKM dan juga didukung oleh struktur serta segenap pihak terkait. Untuk mendorong pelaku UMKM menyajikan laporan keuangan, hal utama yang perlu IAI dan segenap pihak yang terkait lakukan ialah mengidentifikasi dan membangun motivasi dalam penerapannya yang

mungkin tidak lagi berfokus untuk mendapatkan akses perbankan semata. Keberadaan regulasi khusus dapat menjadi salah satu pendorong untuk meningkatnya penerapan SAK EMKM. Selain itu, kolaborasi dengan sejumlah pihak yang berhubungan dengan UMKM untuk mendorong penerapan SAK EMKM juga dapat dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhikara, N. D. (2018). Financial Accounting Standards for Micro, Small & Medium Entities (SAK EMKM) Implementation and Factors That Affect It. *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 50. <https://doi.org/10.31106/jema.v15i2.1126>
- Ardiana, R., Irianto, B. S., & Sdirejeki, K. (2019). ANALYSIS OF THE READINESS OF MSMEs ACTORS IN THE IMPLEMENTATION OF SAK EMKM IN PURWOKERTO. *SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business*, 4(2), 181. <https://doi.org/10.20884/1.sar.2019.4.2.2468>
- Ariefiara, D., Putra, A. M., & Masripah, M. (2019). Peningkatan Kemampuan Umkm Dalam Menyusun Laporan Keuangan Sesuai Dengan Sak Emkm Melalui Pendampingan. *Sabda Mas*, 147–152.
- Handika, A. A. W., & Baridwan, Z. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keinginan UMKM dalam Menerapkan SAK EMKM: Pendekatan Unified. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, 1–20.
- Hanifati, R. S., & Leo, L. (2019). Upaya Meningkatkan Implementasi SAK EMKM melalui Peran Akuntan Berpraktik. *JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 127–142. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i2.17002>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost dan Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Narsa, I. M., Widodo, A., & Kurnianto, S. (2012). Mengungkap Kesiapan Umkm Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( Psak-Etap ) Untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. *Majalah Ekonomi*, (3), 204–214.
- OJK. (2020). *Bagaimana UMKM & Perbankan Dapat Sukses di Era Disrupsi Ekonomi dan Digital*. 1–108.
- Purba, M. A. (2019). Analisis Penerapan Sak Emkm Pada Penyusunan Laporan Keuangan Umkm Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 55. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1219>
- Putra, Y. M. (2018). Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Emkm Pada Umkm Di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Profita*, 11(2), 201. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.004>
- Sudjana. (2019). Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, 2(1), 78–94.
- Sundari, E. M., & Merry, A. S. (2020). ANALISIS PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK EMKM PADA KIOS GAPOKTAN MARGO MAKMUR DI JATIAGUNG LAMPUNG SELATAN. *Jurnal Gentiaras Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 139–152.
- Sutapa, I. N. (2020). Tingkat Penerapan Sak Emkm Pada Pelaku Umkm Dan Upaya

- Peningkatan Penerapan Sak Emkm Dilihat Dari Persepsi Umkm Dan Sosialisasi Sak Emkm. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 63–68. <https://doi.org/10.22225/kr.12.1.1847.63-68>
- Tatik. (2018). Implementasi SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah) Pada Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM XYZ Yogyakarta). *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 14(2), 1–14. <https://doi.org/10.31967/relasi.v14i2.260>
- Trisomantagani, K. A., Yasa, I. N. P., & Yuniarta, G. A. (2017). Persepsi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Kesiapan Dalam Menerapkan Sak Emkm. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.